



## DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA ANGGARAN ASPEK IMPLEMENTASI PADA SATUAN KERJA LINGKUP BPKP RI: ANALISIS PERBANDINGAN

*Impact of Pandemic Covid-19 on Budget Performance of Implementation Aspect at Units Level in Indonesia's National Government Internal*

*Auditor: A Comparative Analysis*

Yudha Perdana Putra<sup>1</sup>

### Info Artikel

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Anggaran,  
Jakarta,  
[yudha.perdanap@kemenkeu.go.id](mailto:yudha.perdanap@kemenkeu.go.id)

Riwayat Artikel :  
Diterima 28-09-2021  
Direvisi 24-11-2021  
Disetujui 25-11-2021  
Tersedia online 29-11-2021

**JEL Classification:** H11, H61

### Abstract

*The Multidimensional crisis due to the COVID-19 pandemic has been forcing the Indonesian Government to take a number of extraordinary policies. During the COVID-19 pandemic, Indonesia's National Government Internal Auditor (BPKP) has also been affected by these policies. BPKP had to make several adjustments and refocussing on its budget and activities. However, in regular budget performance evaluation at the end of 2020, there were indications that some performance indicators for the implementation of the 2020 budget at unit level had decreased. Considering these conditions, this study aims to determine whether there are differences in the value of*

*budget performance at unit level in BPKP by comparing four variables in measuring budget performance implementation of the year before and after the COVID-19 pandemic. The Wilcoxon Signed-Rank Test is used to test all variables measuring budget performance on the implementation aspect. The result shows that there are differences in the value of budget performance in BPKP of the year before and after the covid-19 pandemic. Furthermore, two variables which are budget absorption consistency and budget efficiency show the differences and tendency to decrease. Meanwhile, the other two do not show any difference.*

**Keywords :** Budget Performances, Comparative Test, Covid-19 Pandemic

### Abstrak

Dampak krisis multidimensi akibat pandemi covid-19 memaksa pemerintah Indonesia untuk mengambil sejumlah kebijakan yang bersifat *extraordinary*. Salah satu kebijakan tersebut adalah adanya penyesuaian pelaksanaan layanan oleh instansi pemerintah. Dalam masa pandemi covid-19, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut melaksanakan kebijakan tersebut dengan melakukan penyesuaian dan *refocussing* atas anggaran dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Setelah berakhirnya tahun 2020, dalam kegiatan reguler evaluasi kinerja anggaran, terdapat indikasi bahwa sejumlah indikator kinerja atas pelaksanaan anggaran tahun 2020 pada satuan kerja di lingkungan BPKP mengalami penurunan. Mempertimbangkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

apakah terdapat perbedaan nilai kinerja anggaran pada tingkat satuan kerja dengan membandingkan seluruh indikator kinerja anggaran aspek implementasi pada tahun sebelum dan setelah terjadinya pandemi covid-19. Melalui teknik uji beda *Wilcoxon Signed-Rank Test*, diperoleh hasil bahwa pada periode sebelum dan sesudah pandemi covid-19, terdapat perbedaan nilai kinerja anggaran pada satuan kerja di lingkungan BPKP. Hasil uji terhadap variabel konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dan variabel efisiensi, terbukti menunjukkan perbedaan serta cenderung mengalami penurunan. Sementara itu, hasil uji terhadap variabel penyerapan anggaran dan variabel capaian keluaran tidak menunjukkan perbedaan.

**Kata kunci:** Kinerja Anggaran, Uji Beda, Pandemi Covid-19

---

## 1. PENDAHULUAN

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 merupakan tahun *extraordinary* akibat adanya pandemi covid-19. Kondisi pandemi tersebut secara langsung mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi global sehingga beberapa lembaga internasional memprediksi ekonomi global mengalami resesi (Kementerian Keuangan, 2020). Selain membawa masalah kesehatan masyarakat, pandemi covid-19 juga berimplikasi sangat luas terhadap ekonomi, termasuk di Indonesia. Bahkan, kondisi tersebut pada akhirnya memaksa Pemerintah untuk menerbitkan sejumlah kebijakan untuk menangani covid-19 sekaligus menyelematkan perekonomian, antara lain melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, termasuk turunan peraturan teknisnya. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan kebijakan pembatasan sosial seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kebijakan-kebijakan tersebut pada akhirnya turut mempengaruhi mekanisme kerja di sektor pemerintah dengan penerapan skema kerja dari rumah (*Working from Home/WFH*). Konsep WFH kemudian diterapkan sebagai bagian dari pola kerja dalam tatanan baru (Mungkasa, 2020).

Selain dari sisi pola kerja, pemerintah juga menerapkan kebijakan penyesuaian dan *refocusing* anggaran untuk penanggulangan pandemi covid-19 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 Hal Langkah-Langkah Penyesuaian belanja K/L Tahun 2020. Dalam kebijakan tersebut, anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) perlu dihemat, terutama dari anggaran kegiatan perjalanan dinas dan belanja barang lainnya serta belanja fisik (belanja modal) yang kurang prioritas atau dapat ditunda. Dalam pelaksanaan penghematan anggaran tersebut juga mempertimbangkan pola kerja baru akibat pandemi covid-19. Dampaknya, K/L perlu melakukan penyesuaian kegiatan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Berdasarkan Surat Kepala

BPKP Nomor S-3/K/SU/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan BPKP, pelaksanaan pola kerja baru telah dilaksanakan di BPKP. Selain itu, BPKP juga telah melakukan penyesuaian dan *refocusing* anggaran sesuai kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanggulangan pandemi covid-19. Kedua kondisi tersebut menunjukkan bahwa BPKP telah mendukung suksesnya pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam kondisi pandemi covid-19 di tahun 2020.

Meskipun dalam kondisi pandemi covid-19, dalam menjalankan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, pelaksanaan evaluasi kinerja penganggaran di tahun 2020 tetap dilaksanakan. Tujuan evaluasi kinerja anggaran adalah untuk menjalankan fungsi akuntabilitas, yaitu membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/Lembaga (K/L), unit eselon I/program, dan/atau satuan kerja/kegiatan bersangkutan. Selain itu, pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran juga dilakukan untuk menjalankan fungsi peningkatan kualitas, yaitu mengukur efektivitas dan efisiensi serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L) dalam rangka peningkatan kinerja dan bahan masukan penyusunan kebijakan. Dalam pelaksanaannya, salah satu jenis evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan adalah evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Jenis evaluasi kinerja anggaran ini dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Untuk mengetahui ukuran kinerja anggaran aspek implementasi, digunakan 4 (empat) variabel pengukuran yaitu capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Atas pelaksanaan anggaran tahun 2020, sejumlah ukuran capaian kinerja anggaran BPKP menunjukkan fenomena yang unik. Pada akhir tahun 2020, BPKP melaporkan capaian realisasi anggaran sebesar 96,06%. Capaian realisasi anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan capaian realisasi anggaran dalam 2 (dua) tahun terakhir yang menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2018, realisasi anggaran BPKP mencapai 96,72%. Selanjutnya, pada tahun 2019, realisasi anggaran BPKP mencapai 97,12%. Selain itu, pada level satuan kerja (satker), pada tahun 2020 terjadi penurunan pada indikator rata-rata nilai kinerja satker dibandingkan tahun 2019. Rata-rata nilai kinerja satker pada tahun 2019 mencapai angka 92,84 sedangkan pada tahun 2020 mencapai angka 87,66.

Selain mempengaruhi penyesuaian pola kerja dan kebijakan pemerintah, secara umum, dampak pandemi covid-19 juga telah menyebabkan penurunan angka pertumbuhan ekonomi yang cukup drastis pada triwulan I tahun 2020 (Fahriska dan Roy, 2020). Angka pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I tersebut tercatat pada angka 2,97% (yoy), dimana pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi tercatat pada angka 5,02% (yoy). Selanjutnya, Bank Indonesia (2021) mencatat bahwa pada triwulan II tahun 2020, kembali terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi pada angka -5,32% (yoy), meskipun pada triwulan III mengalami perbaikan angka pertumbuhan ekonomi pada angka -3,49% (yoy), dan kembali mengalami perbaikan pada triwulan IV pada angka -2,19% (yoy). Lebih lanjut, dari sisi pasar keuangan Indonesia, pada awal

triwulan II Tahun 2020, kurs rupiah terhadap US\$ terkoreksi (melemah) sebesar -12,4% dan IHSG telah terkoreksi 28,44%. Dampak pandemi covid-19 tersebut dapat mengakibatkan kepanikan secara luas dan berkepanjangan akibat serbun terhadap dollar AS yang semakin besar sehingga dampaknya dapat lebih buruk dari krisis keuangan (krisis ekonomi) tahun 2008 (Haryanto, 2020).

Terkait dengan krisis ekonomi tahun 2008, terdapat beberapa penelitian yang meneliti pengaruh krisis ekonomi pada tahun 2008 terhadap kinerja pemerintah. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah sebelum dan sesudah krisis ekonomi tahun 2008 (Kurniati dan Achmad, 2012). Melalui analisis perbandingan pada sejumlah indikator kinerja keuangan pemerintah daerah, penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah pada periode sebelum dan sesudah krisis ekonomi tahun 2008 pada indikator tingkat efektifitas, tingkat efisiensi, tingkat aktifitas dan tingkat kontribusi pajak daerah.

Mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut, kajian ini dilakukan untuk menganalisis hasil kinerja anggaran, khususnya pada instansi BPKP tahun 2020, terutama atas capaian kinerja anggaran aspek implementasi pada level satuan kerja dalam tahun pandemi covid-19. Dengan membandingkannya dengan capaian kinerja anggaran atas aspek implementasi tahun sebelumnya, maka dapat dianalisis lebih dalam terkait signifikansi perubahan pada seluruh variabel pengukuran capaian kinerja anggaran atas aspek implementasi serta rekomendasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerja anggaran BPKP pada tahun-tahun berikutnya.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Evaluasi Kinerja Anggaran**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran merupakan proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Makna evaluasi kinerja anggaran dalam pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja tersebut sejalan dengan penjelasan Mardiasmo (2002) bahwa pengukuran kinerja pemerintah dilakukan untuk memenuhi 3 (tiga) tujuan, yaitu memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Lebih lanjut, Suliantoro (2020) mendefinisikan bahwa tujuan pengukuran kinerja meliputi *look back*, *look ahead*, *compensate*, *motivate*, *roll up*, *cascade down*, dan *compare*.

Pengukuran kinerja dalam tujuan *look back* memungkinkan organisasi untuk melihat ke belakang dan melakukan kegiatan di masa lalu. Tujuan *look ahead* berarti hasil pengukuran kinerja di masa lalu dapat menjadi dasar penyusunan atau penentuan target kinerja di masa datang. Tujuan *compensate* dimaknai bahwa pengukuran kinerja memungkinkan pelaksanaan evaluasi bagi individu untuk selanjutnya dapat diberikan kompensasi sesuai dengan kinerja yang dicapai. Tujuan *motivate* berarti hasil pengukuran kinerja di masa lalu dapat dijadikan sebagai motivasi dalam penyusunan atau penentuan kinerja individu di masa yang akan datang. Selanjutnya, *roll up* berarti pengukuran kinerja dapat memungkinkan organisasi untuk

memetakan dan mengkompilasi kinerja di level unit terendah ke level tertinggi. Tujuan *cascade down* bahwa pengukuran kinerja memungkinkan organisasi memetakan dan melakukan derivasi kinerja di level unit tertinggi ke level unit terendah. Sementara itu, tujuan *compare* dimaknai bahwa pengukuran kinerja memungkinkan organisasi untuk membandingkan antar unit dalam suatu organisasi.

Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran, salah satu bentuk evaluasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tersebut adalah evaluasi kinerja anggaran reguler. Jenis evaluasi tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis evaluasi yaitu evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi anggaran atas aspek manfaat, dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek konteks. Dari 3 (tiga) jenis evaluasi kinerja anggaran reguler, jenis evaluasi yang menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran adalah evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.

Pelaksanaan evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan melalui pengukuran pada 4 (empat) variabel, yaitu capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017, keempat variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. **Pengukuran capaian keluaran** dibedakan menjadi pengukuran capaian keluaran (*output*) program dan pengukuran capaian keluaran (*output*) kegiatan.

*Pengukuran Capaian Keluaran (Output) Program* dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (II) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik (II) perbandingan antara realisasi indikator dan target indikator, dengan rumus :

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left( \left( \left( \prod_{i=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_i}{\text{Target Indikator}_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\% \quad (1)$$

Keterangan:

- CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program  
 m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program  
 n : Jumlah Indikator Keluaran (*Output*) Program

*Pengukuran Capaian Keluaran (Output) Kegiatan* dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (II) dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran *dengan* rata-rata ukur secara geometrik (II) perbandingan antara capaian dan target indikator, dengan rumus :

$$CKK = \prod_{i=1}^m \left( \left( \frac{\text{RVK ke } i}{\text{TVK ke } i} \times \left( \prod_{j=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_j}{\text{Target Indikator}_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \quad (2)$$

Keterangan:

- CKK : Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan  
 RVK : Realisasi Volume Keluaran (*Output*) Kegiatan  
 TVK : Target Volume Keluaran (*Output*) Kegiatan  
 m : Jumlah Indikator 0Keluaran (*Output*) Kegiatan  
 n : Jumlah Indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan

- b. **Pengukuran penyerapan anggaran** dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran *dengan* pagu anggaran, dengan rumus :

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\% \quad (3)$$

Keterangan:

- P : Penyerapan Anggaran  
 RA : Akumulasi Realisasi Anggaran  
 PA : Akumulasi Pagu Anggaran

- c. **Pengukuran Efisiensi** dilakukan dengan membandingkan penjumlahan ( $\Sigma$ ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran *dengan* capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran *dengan* penjumlahan ( $\Sigma$ ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, dengan rumus :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\% \quad (4)$$

Keterangan:

- E : Efisiensi  
 PAK<sub>i</sub> : Pagu Anggaran Keluaran i  
 RAK<sub>i</sub> : Realisasi Anggaran Keluaran i  
 CK<sub>i</sub> : Capaian Keluaran i

- d. **Pengukuran Konsistensi Penyerapan terhadap Perencanaan** dilakukan dengan **menghitung** rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana *dengan* deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif, dengan rumus :

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left( \frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n} \quad (5)$$

Keterangan:

- K : Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan  
 RAK : Realisasi Anggaran Kumulatif sampai dengan bulan i  
 RPDK : Rencana Penarikan Dana Kumulatif sampai dengan bulan ke n  
 n : Jumlah Bulan

Selanjutnya, untuk menghasilkan nilai kinerja atas aspek implementasi, maka seluruh variabel (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan terhadap perencanaan, pencapaian keluaran, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama yaitu dari 0 - 100%. Khusus untuk variabel efisiensi, dilakukan transformasi skala sehingga nilainya tidak lagi dalam rentang 0 - 100%, melainkan dalam rentang -20% - 20%, dengan menggunakan rumus:

$$NE = 50\% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right) \quad (6)$$

Keterangan:

- NE : Nilai Efisiensi  
 E : Efisiensi

Transformasi skala nilai efisiensi tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa nilai efisiensi minimal adalah -20% dan nilai efisiensi maksimal adalah 20%. Apabila nilai efisiensi lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai skala maksimal (100%). Sebaliknya, jika nilai efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah skala minimal (0%).

Setelah dilakukan transformasi nilai pada variabel efisiensi, maka nilai kinerja atas aspek implementasi dapat diukur dengan menjumlahkan hasil perkalian antara pengukuran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat eselon I/program atau satuan kerja, dengan rumus :

$$NKI = (P \times W_P) + (K \times W_K) + (CKP \text{ atau } CKK \times W_{CK}) + (NE \times W_E) \quad (7)$$

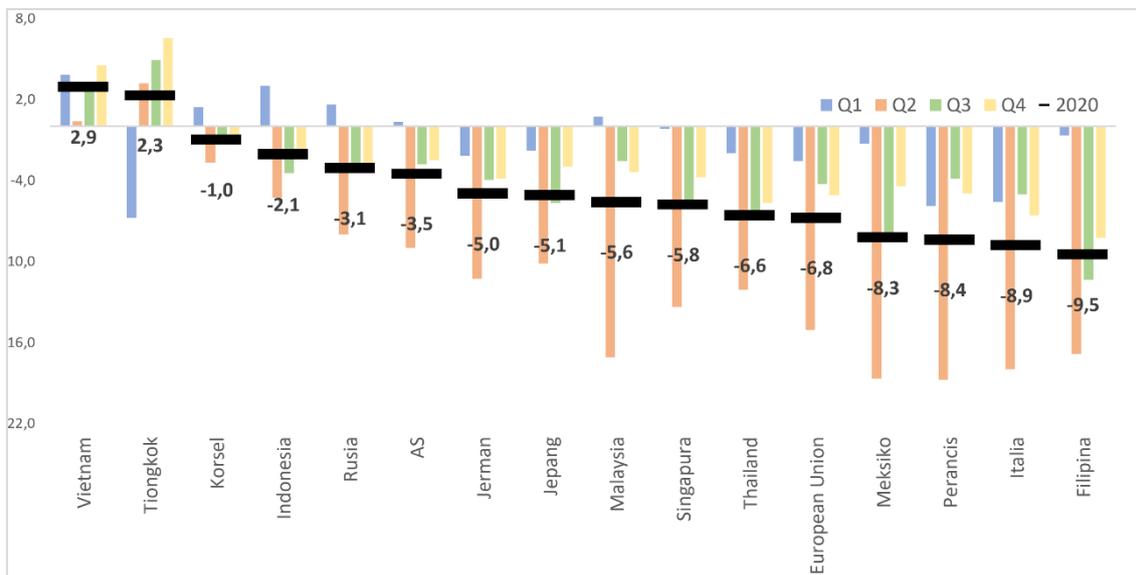
Keterangan:

|          |  |
|----------|--|
| NKI      | : Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi                              |
| P        | : Penyerapan Anggaran  |
| K        | : Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan               |
| CKP      | : Capaian Keluaran (Output) Program                                  |
| CKK      | : Capaian Keluaran (Output) Kegiatan                                 |
| NE       | : Nilai Efisiensi  |
| $W_P$    | : Bobot Penyerapan Anggaran (9,7%)                                   |
| $W_K$    | : Bobot Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (18,2%) |
| $W_{CK}$ | : Bobot Capaian Keluaran (43,5%)                                     |
| $W_E$    | : Bobot Efisiensi (28,6%)  |

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kementerian Keuangan (2020) telah menjelaskan bahwa setiap krisis keuangan atau ekonomi yang terjadi di dunia biasanya disebabkan oleh hal yang berbeda. Apabila krisis pada tahun 1998 disebabkan karena krisis keuangan regional Asia akibat utang masif sektor swasta yang jatuh tempo, maka krisis pada tahun 2008 disebabkan karena kredit macet perumahan Amerika Serikat (*Subprime Mortgage Crisis*) dan harga minyak dunia yang meroket. Sementara itu, krisis yang terjadi di tahun 2020 disebabkan oleh pandemi akibat virus covid-19.

Meskipun penyebab krisis yang terjadi dalam 3 (tiga) dekade berbeda-beda, dan strategi pemulihannya pun berbeda, namun krisis tersebut sama-sama memberikan dampak pada perekonomian, baik global maupun nasional. Bahkan, terhadap pandemi covid-19, Badan Kebijakan Fiskal (2021) menjelaskan bahwa penanganan krisis kesehatan di masa pandemi memaksa perlunya pembatasan gerak dan interaksi yang masif sehingga pandemi covid-19 mengubah arah ekonomi secara drastis pada tahun 2020 dan mendorong dunia ke dalam salah satu kondisi resesi terparah dalam 150 tahun terakhir. Sebagaimana ditampilkan pada Gambar.1, Vietnam dan Tiongkok adalah 2 (dua) dari sedikit negara yang menempati urutan teratas dan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi positif di tahun 2020. Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi positif pada angka 2,9% (yoy), sedangkan Tiongkok pada angka 2,3% (yoy). Sementara itu, banyak negara di berbagai belahan dunia yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif di sepanjang tahun 2020.



Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, 2021 (Diolah)

**Gambar 1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 di berbagai negara (% , yoy)**

Sebagai negara yang turut terdampak pandemi covid-19, pada tahun 2020, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada angka 2,1% (yoy). Meskipun demikian, secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 terus bergerak ke arah perbaikan (Bank Indonesia, 2021). Pada triwulan I tercatat pada angka 2,97% (yoy), triwulan II tercatat pada angka -5,32% (yoy), triwulan III tercatat pada angka -3,49% (yoy), dan triwulan IV tercatat pada angka -2,19% (yoy).

Dalam menangani pandemi covid-19, pada tahun 2020 pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Sebagai bagian dari implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut, K/L melakukan berbagai langkah penyesuaian, antara lain mengubah pola kerja dan mekanisme pelayanan hingga melakukan *refocusing* terhadap prioritas kegiatan maupun anggarannya, sehingga K/L tetap optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dilakukan oleh K/L, khususnya pada BPKP, analisis akan dilakukan dengan membandingkan hasil evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada variabel penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, capaian keluaran, dan efisiensi di level satuan kerja pada tahun sebelum dan setelah (selama tahun pertama) penerapan kebijakan-kebijakan tersebut. Selain itu, analisis juga akan membandingkan nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi pada level satuan kerja untuk mendukung kesimpulan atas fenomena penurunan rata-rata nilai kinerja satuan kerja di lingkup BPKP.

Mempertimbangkan dampak krisis ekonomi dan keuangan terhadap perekonomian dunia dan nasional, dalam kajian ini, dirumuskan sejumlah hipotesis yang mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Ariane, Fadli, & Lismawati (2013) serta Kurniati & Ahmad (2012) terkait dengan analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008.



**Gambar 2. Kerangka pemikiran penelitian**

Selanjutnya, sebagaimana disajikan pada Gambar 2, setelah melakukan sejumlah penyesuaian terhadap variabel uji, hipotesis penelitian kemudian disusun terhadap variabel evaluasi kinerja aspek implementasi pada instansi BPKP dengan rumusan sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Terdapat perbedaan kinerja *penyerapan anggaran* antara sebelum pandemi covid-19 di tahun 2019 dan sesudah/selama pandemi covid-19 di tahun 2020
- H<sub>2</sub> : Terdapat perbedaan kinerja *konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan* antara sebelum pandemi covid-19 di tahun 2019 dan sesudah/selama pandemi covid-19 di tahun 2020
- H<sub>3</sub> : Terdapat perbedaan kinerja *capaian keluaran (output) kegiatan* antara sebelum pandemi covid-19 di tahun 2019 dan sesudah/selama pandemi covid-19 di tahun 2020
- H<sub>4</sub> : Terdapat perbedaan kinerja *efisiensi* antara sebelum pandemi covid-19 di tahun 2019 dan sesudah/selama pandemi covid-19 di tahun 2020
- H<sub>5</sub> : Terdapat perbedaan *nilai rata-rata kinerja satker* antara sebelum pandemi covid-19 di tahun 2019 dan sesudah/selama pandemi covid-19 di tahun 2020

### 3. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan data populasi sebagai data uji penelitian, yaitu menggunakan seluruh variabel pengukuran kinerja anggaran atas aspek implementasi dari seluruh satuan kerja yang berada di lingkup BPKP pada tahun 2019 dan tahun 2020. Data variabel pengukuran kinerja anggaran tahun 2019 dipilih sebagai data tahun sebelum pandemi covid-19 sedangkan data kinerja anggaran tahun 2020 dipilih sebagai tahun setelah/selama pandemi covid-19.

Data kajian merupakan jenis data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Anggaran. Data tersebut diperoleh dengan mengakses data evaluasi kinerja anggaran melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART). Data tersebut berupa data/nilai hasil evaluasi kinerja anggaran aspek implementasi yaitu persentase penyerapan anggaran, konsistensi atas rencana penarikan dana (sebagai indikator penyerapan terhadap perencanaan), pencapaian keluaran, dan efisiensi serta rata-rata nilai kinerja satker.

Pengujian analisis atas hipotesis akan menggunakan teknik uji beda dengan menggunakan *Wilcoxon Signed-Rank Test*. Penggunaan teknik uji tersebut relevan karena bertujuan untuk

membandingkan dan mengetahui perbedaan rata-rata dari 2 (dua) sampel yang saling berpasangan (Triwiyanti, Ardina, & Maghfira, 2019). Teknik uji beda *Wilcoxon Signed-Rank Test* memiliki keunggulan karena dapat digunakan untuk data kuantitatif yang tidak berdistribusi normal. Selain itu, pemilihan teknik uji beda tersebut juga mempertimbangkan penelitian Ariane, Fadli, & Lismawati (2013) serta penelitian Kurniati & Ahmad (2012) yang menjadi salah satu referensi dalam kajian ini.

Selanjutnya, dalam melakukan analisis akan dilakukan pengujian *test of normality* dan *output test statistics*. Untuk tahapan *test of normality*, sebaran data akan diuji dengan metode *Shapiro Wilk* karena data yang digunakan hanya 40 (empat puluh) data atau tergolong kecil. Sesuai dengan penjelasan Yazici & Yolacan (2007) dan Herawati (2016), untuk sampel data kurang dari 50 sampel ( $N < 50$ ), disarankan menggunakan uji *Shapiro Wilk*. Terhadap hasil pengujian, apabila hasil uji data menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 (sig.  $> 0,05$ ), maka data terdistribusi normal. Sementara itu, apabila hasil uji daya menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (sig.  $< 0,05$ ), maka suatu data tidak terdistribusi normal

Selanjutnya, untuk tahapan *output test statistics*, apabila hasil *test of normality* menunjukkan bahwa sebaran data terdistribusi normal, maka untuk mengetahui perbedaan rata-rata sampel yang berhubungan/berpasangan akan menggunakan pengujian *Paired Sample t-test*. Sementara itu, apabila sebaran data tidak terdistribusi normal, maka untuk mengetahui perbedaan rata-rata sampel yang berhubungan/berpasangan akan menggunakan pengujian *Wilcoxon Signed-rank Test*. Kemudian, dasar pengambilan keputusan adalah dengan melihat nilai signifikansi (Triwiyanti, Ardina, dan Maghfira, 2019). Apabila nilai signifikansi lebih besar dari nilai  $\alpha$  0,05 (sig.  $> 0,05$ ), maka  $H_0$  tidak dapat ditolak secara statistik dan  $H_1$  ditolak secara statistik. Artinya, tidak terdapat perbedaan rata-rata dari sampel yang diuji. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi kurang dari nilai  $\alpha$  0,05 (sig.  $< 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak secara statistik dan  $H_1$  tidak dapat ditolak secara statistik, yang berarti terdapat perbedaan rata-rata dari sampel yang diuji.

#### 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### Pengujian Normalitas Data (Test of Normality)

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode *Shapiro Wilk* sebagaimana disajikan dalam Tabel 1, seluruh data variabel uji menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (sig.  $< 0,05$ ). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh data dalam kajian tidak berdistribusi normal. Triwiyanti, Ardina, dan Maghfira (2019) menjelaskan bahwa apabila data yang digunakan dalam penelitian tidak berdistribusi normal, maka uji beda menggunakan teknik uji non-parametrik dengan menggunakan *Wilcoxon Signed-Rank Test*.

**Tabel 1. Hasil pengujian normalitas data**

|                                 | Tests of Normality              |    |      |              |    |      |
|---------------------------------|---------------------------------|----|------|--------------|----|------|
|                                 | Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup> |    |      | Shapiro-Wilk |    |      |
|                                 | Statistic                       | df | Sig. | Statistic    | df | Sig. |
| Penyerapan Anggaran 2019        | .208                            | 40 | .000 | .641         | 40 | .000 |
| Konsistensi atas RPD Awal 2019  | .179                            | 40 | .002 | .807         | 40 | .000 |
| Konsistensi atas RPD Akhir 2019 | .377                            | 40 | .000 | .359         | 40 | .000 |
| Capaian Keluaran 2019           | .538                            | 40 | .000 | .147         | 40 | .000 |
| Efisiensi 2019                  | .179                            | 40 | .002 | .860         | 40 | .000 |

|                                 | Tests of Normality              |    |      |              |    |      |
|---------------------------------|---------------------------------|----|------|--------------|----|------|
|                                 | Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup> |    |      | Shapiro-Wilk |    |      |
|                                 | Statistic                       | df | Sig. | Statistic    | df | Sig. |
| Nilai Kinerja 2019              | .168                            | 40 | .006 | .899         | 40 | .002 |
| Penyerapan Anggaran 2020        | .170                            | 40 | .005 | .865         | 40 | .000 |
| Konsistensi atas RPD Awal 2020  | .269                            | 40 | .000 | .740         | 40 | .000 |
| Konsistensi atas RPD Akhir 2020 | .254                            | 40 | .000 | .663         | 40 | .000 |
| Capaian Keluaran 2020           | .502                            | 40 | .000 | .289         | 40 | .000 |
| Efisiensi 2020                  | .129                            | 40 | .089 | .875         | 40 | .000 |
| Nilai Kinerja 2020              | .207                            | 40 | .000 | .804         | 40 | .000 |

a. Lilliefors Significance Correction

### *Pengujian Wilcoxon Signed-Rank Test (Output Test Statistics)*

**Tabel 2. Hasil pengujian test statistics wilcoxon signed-rank test**

|                        | Test Statistics <sup>a</sup>                        |   |   |   |                                 |   |
|------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|---|
|                        | Penyerapan Anggaran 2020 - Penyerapan Anggaran 2019 | Konsistensi atas RPD Awal 2020 - Konsistensi atas RPD Awal 2019 | Konsistensi atas RPD Akhir 2020 - Konsistensi atas RPD Akhir 2019 | Capaian Keluaran 2020 - Capaian Keluaran 2019 | Efisiensi 2020 - Efisiensi 2019 | Nilai Kinerja 2020 - Nilai Kinerja 2019 |
| Z                      | -.746 <sup>b</sup>                                  | -5.067 <sup>c</sup>   | -3.569 <sup>b</sup>   | -.677 <sup>b</sup>                            | -4.933 <sup>b</sup>             | -4.920 <sup>b</sup>                     |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .456  | .000  | .000  | .498  | .000                            | .000                                    |

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

c. Based on negative ranks.

Berdasarkan hasil *Wilcoxon Signed-Rank Test (Output Test Statistics)* sebagaimana disajikan pada Tabel-2, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Variabel Penyerapan Anggaran

Pengujian terhadap variabel penyerapan anggaran menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*sig.* 0,456) lebih tinggi dari nilai *alpha* (0,05). Dengan demikian,  $H_1$  ditolak secara statistik, yang berarti tidak terdapat perbedaan kinerja penyerapan anggaran pada tahun sebelum dan sesudah pandemi covid-19.

Berdasarkan laporan kinerja BPKP Tahun 2019 dan Tahun 2020, secara umum, terdapat penurunan persentase penyerapan anggaran sekitar 1,10%. Penyerapan anggaran tahun 2019 tercatat sebesar Rp1.592,58 Miliar dari pagu anggaran sebesar Rp1.639,81 Miliar (atau sekitar 97,12%). Sementara itu, penyerapan anggaran tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.485,30 Miliar dari pagu anggaran sebesar Rp1.546,29 Miliar (atau sekitar 96,06%). Meskipun mengalami penurunan kinerja penyerapan anggaran, hasil uji statistik, menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja penyerapan anggaran pada tahun sebelum pandemi covid-19 (tahun 2019) dan tahun sesudah/selama pandemi covid-19 (tahun 2020).

**Tabel 3. Output ranks penyerapan anggaran pada wilcoxon signed-rank test**

|  |                | N               | Mean Rank | Sum of Ranks |
|--|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| Penyerapan Anggaran 2020 -<br>Penyerapan Anggaran 2019 | Negative Ranks | 21 <sup>a</sup> | 22,17     | 465,50       |
|  | Positive Ranks | 19 <sup>b</sup> | 18,66     | 354,50       |
|  | Ties           | 0 <sup>c</sup>  |           |              |
|  | Total          | 40              |           |              |

a. Penyerapan Anggaran 2020 < Penyerapan Anggaran 2019

b. Penyerapan Anggaran 2020 > Penyerapan Anggaran 2019

c. Penyerapan Anggaran 2020 = Penyerapan Anggaran 2019

Hal tersebut terjadi karena berdasarkan output *ranks* variabel penyerapan anggaran sebagaimana disajikan pada Tabel-3, apabila dibandingkan nilai penyerapan anggaran tahun 2020 dan tahun 2019, teridentifikasi bahwa dari 40 (empat puluh) satker uji, sekitar 52,5% satker (atau 21 satker) mengalami penurunan penyerapan anggaran, sementara itu sekitar 47,5% satker (atau 19 satker) mengalami kenaikan anggaran. Artinya, dari sisi jumlah, satker yang mengalami penurunan dan kenaikan penyerapan anggaran relatif sama. Selain itu, besaran rata-rata penurunan penyerapan anggaran sekitar -1,7% sedangkan rata-rata kenaikan penyerapan anggaran sekitar 1,8% yang menunjukkan bahwa selisih perubahan rata-rata penyerapan anggaran relative tidak signifikan. Dengan demikian, dalam kondisi pandemi covid-19 di tahun 2020, secara umum satker-satker di lingkup BPKP telah melakukan penyerapan anggaran pada tingkat yang relatif tidak berbeda dengan capaian penyerapan anggaran di tahun 2019 atau sebelum pandemi.

b. Variabel Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

Pengujian terhadap variabel konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan diwakili oleh indikator konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Nilai signifikansi konsistensi atas **RPD awal** (*sig. 0,000*) lebih kecil dari nilai *alpha* (*0,05*). Dengan demikian, H<sub>2</sub> tidak dapat ditolak secara statistik, yang berarti terdapat perbedaan kinerja konsistensi atas RPD awal pada tahun sebelum dan sesudah pandemi covid-19.
- 2) Nilai signifikansi konsistensi atas **RPD akhir** (*sig. 0,000*) lebih kecil dari nilai *alpha* (*0,05*). Dengan demikian, H<sub>2</sub> tidak dapat ditolak secara statistik, yang berarti terdapat perbedaan kinerja konsistensi atas RPD awal pada tahun sebelum dan sesudah pandemi covid-19.

Hasil Uji Indikartor Konsistensi atas RPD Awal

Terkait hasil uji indikator konsistensi atas RPD awal, dengan nilai signifikansi (*sig. 0,000*) lebih kecil dari nilai *alpha* (*0,05*), maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan kinerja konsistensi atas RPD awal pada tahun sebelum dan sesudah pandemi covid-19.

Selain itu, hasil output *ranks* variabel Konsistensi atas RPD Awal, sebagaimana disajikan pada Tabel-4, menunjukkan bahwa sekitar 87,5% satker (atau 35 satker) mengalami kenaikan nilai konsistensi, sedangkan sekitar 12,5% satker (atau 5 satker) mengalami penurunan nilai konsistensi. Selanjutnya, berdasarkan sebaran data dari 40 satker, rata-rata nilai konsistensi atas RPD Awal tahun 2019 sebesar 64,45%, sedangkan

rata-rata nilai konsistensi atas RPD awal tahun 2020 sebesar 79,66%. Kenaikan nilai konsistensi tersebut menunjukkan bahwa ketepatan penyerapan anggaran per bulan berdasarkan rencana penarikan dana awal tahun 2020 relatif lebih baik dibandingkan dengan ketepatan penyerapan anggaran per bulan berdasarkan rencana penarikan dana awal tahun 2019.

**Tabel 4. Output ranks konsistensi atas RPD awal pada wilcoxon signed-rank test**

|   |                | N               | Mean Rank | Sum of Ranks |
|---|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| Konsistensi atas RPD Awal 2020 - Konsistensi atas RPD Awal 2019 | Negative Ranks | 5 <sup>d</sup>  | 6,60      | 33,00        |
|   | Positive Ranks | 35 <sup>e</sup> | 22,49     | 787,00       |
|   | Ties           | 0 <sup>f</sup>  |           |              |
|   | Total          | 40              |           |              |

d. Konsistensi atas RPD Awal 2020 < Konsistensi atas RPD Awal 2019

e. Konsistensi atas RPD Awal 2020 > Konsistensi atas RPD Awal 2019

f. Konsistensi atas RPD Awal 2020 = Konsistensi atas RPD Awal 2019

Dalam perhitungan nilai konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, semakin tepat dan konsisten angka penyerapan anggaran satker per bulan terhadap angka rencana penarikan dana bulanan yang telah disusun, maka nilainya akan semakin tinggi (mendekati 100%). Dengan demikian, hasil uji konsistensi atas RPD awal dapat mengindikasikan bahwa satker-satker BPKP telah menyusun RPD awal tahun 2020 dengan lebih baik sehingga penyerapan anggaran per bulan menjadi lebih tepat dibandingkan dengan RPD awal yang disusun di tahun 2019 terhadap penyerapan anggaran per bulannya.

#### Hasil Uji Indikator Konsistensi atas RPD Akhir

Terkait hasil uji indikator konsistensi atas RPD akhir, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja konsistensi atas RPD awal pada tahun sebelum dan sesudah pandemi covid-19. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil output *ranks* variabel Konsistensi atas RPD Akhir, sebagaimana disajikan pada Tabel-5, apabila dibandingkan nilai konsistensi atas RPD akhir tahun 2020 dan tahun 2019, untuk variabel konsistensi atas RPD Akhir, dari 40 (empat puluh) satker uji, sekitar 80,0% satker (atau 32 satker) mengalami penurunan nilai konsistensi, sementara itu sekitar 20,0% satker (atau 8 satker) mengalami kenaikan nilai konsistensi.

**Tabel 5. Output ranks konsistensi atas RPD akhir pada wilcoxon signed-rank test**

|   |                | N               | Mean Rank | Sum of Ranks |
|---|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| Konsistensi atas RPD Akhir 2020 - Konsistensi atas RPD Akhir 2019 | Negative Ranks | 32 <sup>g</sup> | 21,11     | 675,50       |
|   | Positive Ranks | 8 <sup>h</sup>  | 18,06     | 144,50       |
|   | Ties           | 0 <sup>i</sup>  |           |              |
|   | Total          | 40              |           |              |

g. Konsistensi atas RPD Akhir 2020 < Konsistensi atas RPD Akhir 2019

h. Konsistensi atas RPD Akhir 2020 > Konsistensi atas RPD Akhir 2019

i. Konsistensi atas RPD Akhir 2020 = Konsistensi atas RPD Akhir 2019

Dalam perhitungan nilai konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, semakin tepat dan konsisten angka penyerapan anggaran satker per bulan terhadap angka rencana penarikan dana bulanan yang telah disusun, maka nilainya akan semakin tinggi (mendekati 100%). Sementara itu, hasil pengujian menunjukkan 32 satker mengalami penurunan nilai konsistensi. Selain itu, berdasarkan sebaran data dari 40 satker, rata-rata

nilai konsistensi atas RPD Akhir tahun 2019 sebesar 98,86%, sedangkan rata-rata nilai konsistensi atas RPD Akhir tahun 2020 sebesar 97,54%. Artinya, dalam kondisi pandemi covid-19 di tahun 2020, sebagian besar satker di lingkup BPKP mengalami penurunan nilai konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dibandingkan dengan capaian nilai konsistensi di tahun sebelumnya (tahun 2019).

Penurunan nilai konsistensi atas RPD Akhir pada tahun 2020 dapat menunjukkan bahwa ketepatan angka penyerapan anggaran per bulan terhadap rencana penarikan bulanan di tahun 2020 relatif lebih tidak konsisten dibandingkan dengan ketepatan angka penyerapan anggaran per bulan terhadap rencana penarikan dana bulanan yang telah dilakukan di tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan oleh satker-satker di lingkup BPKP relatif lebih dinamis pada kondisi pandemi covid-19 di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sehingga satker-satker di lingkungan BPKP relatif lebih banyak melakukan penyesuaian RPD bulanan sampai dengan akhir tahun dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020.

c. Variabel Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan

Pengujian terhadap variabel capaian keluaran (*output*) kegiatan menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*sig. 0,498*) lebih tinggi dari nilai *alpha (0,05)*. Dengan demikian,  $H_3$  ditolak secara statistik, yang berarti tidak terdapat perbedaan kinerja capaian keluaran (*output*) kegiatan pada tahun sebelum dan sesudah pandemi covid-19.

**Tabel 6. *Output ranks* capaian keluaran pada *wilcoxon signed-rank test***

|  |                | N               | Mean Rank | Sum of Ranks |
|--|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| Capaian Keluaran 2020 -<br>Capaian Keluaran 2019 | Negative Ranks | 4 <sup>j</sup>  | 2,50      | 10,00        |
|  | Positive Ranks | 1 <sup>k</sup>  | 5,00      | 5,00         |
|  | Ties           | 35 <sup>l</sup> |           |              |
|  | Total          | 40              |           |              |

j. Capaian Keluaran 2020 < Capaian Keluaran 2019

k. Capaian Keluaran 2020 > Capaian Keluaran 2019

l. Capaian Keluaran 2020 = Capaian Keluaran 2019

Berdasarkan hasil *output ranks* variabel capaian keluaran, sebagaimana disajikan pada Tabel-6, apabila dibandingkan capaian keluaran tahun 2020 dan tahun 2019, sekitar 10% satker (atau 4 satker) mengalami penurunan nilai capaian keluaran, sekitar 2,5% satker (atau 1 satker) mengalami kenaikan nilai capaian keluaran, dan sekitar 87,5% satker (35 satker) mempunyai nilai capaian keluaran yang sama yaitu pada angka 100%.

Sebagaimana disajikan dalam Tabel-7, pada tahun 2020 terdapat perubahan jumlah keluaran pada BPKP. Dari seluruh satker di lingkungan BPKP, sekitar 2,5% satker (atau 1 satker) tidak mengalami perubahan jumlah keluaran, sekitar 10,0% satker (atau 4 satker) mengalami kenaikan jumlah keluaran, dan sekitar 87,5% satker (atau 35 satker) mengalami penurunan jumlah keluaran. Meskipun sebagian besar satker mengalami penurunan jumlah keluaran, hanya sekitar 10% satker (atau 4 satker) mengalami penurunan nilai capaian keluaran, sedangkan satker-satker lainnya berhasil mencapai nilai capaian keluaran sebesar 100%.

**Tabel 7. Perubahan jumlah dan nilai capaian keluaran BPKP tahun 2019-2020**

| No            | Satker           | Jumlah Keluaran (Output) |            |            | Nilai Capaian Keluaran |                |             |
|---------------|------------------|--------------------------|------------|------------|------------------------|----------------|-------------|
|               |                  | 2019                     | 2020       | Perubahan  | 2019                   | 2020           | Perubahan   |
| 1             | Satker Uji ke-1  | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 2             | Satker Uji ke-2  | 7                        | 8          | 1          | 100,00                 | 86,83          | -13,17      |
| 3             | Satker Uji ke-3  | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 4             | Satker Uji ke-4  | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 5             | Satker Uji ke-5  | 152                      | 109        | -43        | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 6             | Satker Uji ke-6  | 8                        | 9          | 1          | 100,00                 | 94,51          | -5,49       |
| 7             | Satker Uji ke-7  | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 8             | Satker Uji ke-8  | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 9             | Satker Uji ke-9  | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 94,51          | -5,49       |
| 10            | Satker Uji ke-10 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 11            | Satker Uji ke-11 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 12            | Satker Uji ke-12 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 13            | Satker Uji ke-13 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 14            | Satker Uji ke-14 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 15            | Satker Uji ke-15 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 16            | Satker Uji ke-16 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 17            | Satker Uji ke-17 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 18            | Satker Uji ke-18 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 19            | Satker Uji ke-19 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 99,57          | -0,43       |
| 20            | Satker Uji ke-20 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 21            | Satker Uji ke-21 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 22            | Satker Uji ke-22 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 23            | Satker Uji ke-23 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 24            | Satker Uji ke-24 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 25            | Satker Uji ke-25 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 26            | Satker Uji ke-26 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 27            | Satker Uji ke-27 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 28            | Satker Uji ke-28 | 4                        | 4          | 0          | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 29            | Satker Uji ke-29 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 30            | Satker Uji ke-30 | 11                       | 5          | -6         | 69,85                  | 100,00         | 30,15       |
| 31            | Satker Uji ke-31 | 4                        | 6          | 2          | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 32            | Satker Uji ke-32 | 3                        | 4          | 1          | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 33            | Satker Uji ke-33 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 34            | Satker Uji ke-34 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 35            | Satker Uji ke-35 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 36            | Satker Uji ke-36 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 37            | Satker Uji ke-37 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 38            | Satker Uji ke-38 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 39            | Satker Uji ke-39 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| 40            | Satker Uji ke-40 | 10                       | 9          | -1         | 100,00                 | 100,00         | 0           |
| <b>Jumlah</b> |                  | <b>519</b>               | <b>442</b> | <b>-77</b> | <b>3969,85</b>         | <b>3975,42</b> | <b>5,57</b> |

Sumber : Data Olahan dari Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), 2019-2020

Meskipun pada tahun 2020 terdapat pengurangan anggaran (penghematan anggaran), satker-satker di lingkungan BPKP telah melakukan penyesuaian pada jumlah dan target keluaran beserta dengan anggaran yang diperlukan. Berdasarkan data SMART, pada akhir tahun anggaran, sekitar 90% satker (36 dari 40 satker) nilai capaian keluaran tercatat pada angka 100%, sedangkan sisanya 10% satker (4 dari 40 satker) capaian nilai keluaran

berturut-turut tercatat pada angka 94,57%, 94,51%, 94,51%, dan 86,83%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi pandemi covid-19 pada tahun 2020, sebagian besar satker di lingkup BPKP telah mencapai target keluaran pada nilai atau besaran yang sama dengan capaian target keluaran pada tahun 2019 sehingga relatif tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

d. Variabel Efisiensi

Pengujian terhadap variabel efisiensi menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*sig. 0,000*) lebih rendah dari nilai *alpha (0,05)*. Dengan demikian,  $H_4$  tidak dapat ditolak secara statistik, yang berarti terdapat perbedaan kinerja efisiensi pada tahun sebelum dan sesudah pandemi covid-19.

**Tabel 8. Output ranks efisiensi pada wilcoxon signed-rank test**

|                                 |                | N               | Mean Rank | Sum of Ranks |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| Efisiensi 2020 - Efisiensi 2019 | Negative Ranks | 35 <sup>m</sup> | 22,20     | 777,00       |
|                                 | Positive Ranks | 5 <sup>n</sup>  | 8,60      | 43,00        |
|                                 | Ties           | 0 <sup>o</sup>  |           |              |
|                                 | Total          | 40              |           |              |

m. Efisiensi 2020 < Efisiensi 2019

n. Efisiensi 2020 > Efisiensi 2019

o. Efisiensi 2020 = Efisiensi 2019

Apabila dibandingkan nilai efisiensi tahun 2020 dan tahun 2019, berdasarkan hasil output *ranks* variabel efisiensi, sebagaimana disajikan pada Tabel 8. *Output Ranks* Efisiensi pada *Wilcoxon Signed-Rank Test*, sekitar 87,5% satker (atau 35 satker) mengalami penurunan nilai efisiensi sedangkan sisanya 12,5% satker (atau 5 satker) mengalami kenaikan nilai efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandemi covid-19 di tahun 2020, nilai efisiensi anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh sebagian satker lingkup BPKP mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan nilai efisiensi yang telah dicapai di tahun 2019. Penurunan nilai efisiensi tersebut juga didukung data berdasarkan SMART bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi pada satker lingkup BPKP berada pada rentang 2,53% - 20,00% dengan rata-rata sebesar 11,3%. Sementara itu, pada tahun 2020, tingkat efisiensi pada satker lingkup BPKP berada pada rentang 0,51% - 14,27% dengan rata-rata sebesar 4,14%.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017, untuk variabel efisiensi, dilakukan transformasi skala sehingga nilainya tidak lagi dalam rentang 0 - 100%, melainkan dalam rentang -20% - 20%. Artinya, -20% adalah batas minimal nilai efisiensi dan +20% adalah batas atas nilai efisiensi. Suliantoro (2020) menjelaskan bahwa apabila nilai efisiensi lebih besar dari 20%, maka diasumsikan angka target keluaran terlalu mudah dicapai atau angka pagu anggaran (besaran anggaran yang dialokasikan) terlalu besar. Apabila nilai efisiensi lebih kecil dari -20% (misalnya -21%, -25%, dan seterusnya), maka angka target keluaran diasumsikan terlalu sulit dicapai atau angka pagu anggaran terlalu kecil. Sementara itu, apabila nilai efisiensi anggaran sama dengan 0%, maka diasumsikan capaian keluaran dan realisasi anggarannya sesuai dengan target keluar dan pagu anggarannya.

Nilai efisiensi tahun 2020 berada pada rentang yang lebih pendek yaitu 0,51% - 14,27% dan dengan nilai rata-rata yang lebih rendah yaitu sebesar 4,14% apabila

dibandingkan dengan rentang nilai efisiensi tahun sebelumnya (2,53% - 20,00%) dan rata-rata nilai efisiensi tahun sebelumnya (11,3%). Terhadap penurunan rentang dan rata-rata nilai efisiensi tersebut dapat diasumsikan bahwa nilai efisiensi satker lingkup BPKP di masa pandemi Covid-19 bergerak menuju ke titik 0%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa capaian keluaran dan realisasi anggarannya bergerak menuju tingkat relatif sama dengan target keluaran dan pagu anggarannya.

e. Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran Satker

Pengujian terhadap rata-rata nilai kinerja anggaran satker menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*sig.* 0,000) lebih rendah dari nilai *alpha* (0,05). Dengan demikian,  $H_5$  tidak dapat ditolak secara statistik, yang berarti terdapat perbedaan rata-rata nilai kinerja anggaran satker pada tahun sebelum dan sesudah pandemi covid-19.

**Tabel 9. Output ranks nilai kinerja pada wilcoxon signed-rank test**

|   |                | N               | Mean Rank | Sum of Ranks |
|---|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| Nilai Kinerja 2020 - Nilai Kinerja 2019 | Negative Ranks | 35 <sup>p</sup> | 22,17     | 776,00       |
|   | Positive Ranks | 5 <sup>q</sup>  | 8,80      | 44,00        |
|   | Ties           | 0 <sup>r</sup>  |           |              |
|   | Total          | 40              |           |              |

p. Nilai Kinerja 2020 < Nilai Kinerja 2019

q. Nilai Kinerja 2020 > Nilai Kinerja 2019

r. Nilai Kinerja 2020 = Nilai Kinerja 2019

Berdasarkan hasil output *ranks* variabel nilai kinerja, sebagaimana disajikan pada Tabel-9, apabila dibandingkan antara rata-rata nilai kinerja anggaran satker lingkup BPKP tahun 2020 dengan tahun 2019, sekitar 87,5% satker (atau 35 satker) mengalami penurunan nilai kinerja. Sementara itu, sekitar 12,5% (atau 5 satker) mengalami kenaikan nilai kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kinerja pada sebagian besar satker lingkup BPKP pada masa pandemi covid-19 di tahun 2020 mengalami penurunan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017, pengukuran nilai kinerja atas aspek implementasi tingkat satker dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara pengukuran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada satuan kerja. Variabel atau indikator yang diperlukan dalam perhitungan meliputi nilai penyerapan anggaran, konsistensi atas RPD akhir, pencapaian keluaran, dan efisiensi.

Selanjutnya, hasil uji beda *Wilcoxon Signed-Rank Test* menunjukkan bahwa pada variabel penyerapan anggaran dan variabel pencapaian keluaran tidak terdapat perbedaan pada tahun sebelum pandemi di tahun 2019 dan sesudah/selama pandemi covid-19 di tahun 2020. Sementara itu, pada variabel konsistensi atas RPD akhir dan variabel efisiensi menunjukkan terdapat perbedaan pada tahun sebelum pandemi di tahun 2019 dan sesudah/selama pandemi covid-19 di tahun 2020 dan perbedaan tersebut menunjukkan indikasi penurunan nilai, baik pada nilai konsistensi atas RPD akhir maupun efisiensi.

Terkait perbedaan rata-rata nilai kinerja anggaran satker di lingkup BPKP tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, maka penurunan nilai kinerja satker tersebut disebabkan oleh penurunan nilai variabel konsistensi atas RPD akhir dan variabel efisiensi.

## **5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Hasil uji statistik terhadap nilai penyerapan anggaran menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja penyerapan anggaran pada satker lingkup BPKP antara sebelum pandemi covid-19 di tahun 2019 dan sesudah/selama pandemi covid-19 di tahun 2020. Hasil uji statistik terhadap nilai konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan pada satker lingkup BPKP antara sebelum pandemi covid-19 di tahun 2019 dan sesudah/selama pandemi covid-19 di tahun 2020. Hasil uji statistik terhadap nilai capaian keluaran (*output*) kegiatan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja capaian keluaran (*output*) kegiatan pada satker lingkup BPKP antara sebelum pandemi covid-19 di tahun 2019 dan sesudah/selama pandemi covid-19 di tahun 2020. Hasil uji statistik terhadap nilai efisiensi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja efisiensi pada satker lingkup BPKP antara sebelum pandemi covid-19 di tahun 2019 dan sesudah/selama pandemi covid-19 di tahun 2020.

Secara umum, berdasarkan hasil uji statistik terhadap rata-rata nilai kinerja anggaran satker lingkup BPKP, terdapat perbedaan capaian nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi pada satker lingkup BPKP antara sebelum pandemi covid-19 di tahun 2019 dan sesudah/selama pandemi covid-19 di tahun 2020.

Sebagai masukan dalam upaya peningkatan nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi pada satker lingkup BPKP, langkah pertama yang perlu ditindaklanjuti BPKP adalah merumuskan rencana penarikan dana per bulan dalam perhitungan yang telah mempertimbangkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan pandemi covid-19, misalnya pola kerja baru seperti WFH dan pembatasan pelaksanaan kegiatan di luar kantor serta optimalisasi anggaran. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalkan perubahan total RPD sehingga penyerapan anggaran per bulan lebih konsisten sesuai RPD bulanan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tingkat perubahan RPD dalam ditekan pada tingkat yang wajar mengingat kondisi pandemi covid-19 masih berlangsung. Selain itu, nilai konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dapat didorong untuk bergerak naik menuju tingkat 100%.

Selanjutnya, BPKP perlu melakukan revaluasi atas capaian target keluaran beserta anggaran yang telah digunakan (direalisasikan) pada tahun-tahun sebelumnya dalam rangka penyusunan target keluaran dan anggaran yang dibutuhkan pada tahun-tahun berikutnya. Mengingat nilai efisiensi tahun 2020 lebih rendah dari tahun 2019, maka dalam mencapai target keluaran perlu anggaran yang lebih efisien. Dengan demikian, nilai efisiensi dapat didorong pada tingkat yang lebih optimal untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran aspek implementasi secara keseluruhan.

Meskipun variabel penyerapan anggaran dan capaian keluaran pada kondisi pandemi covid-19 di tahun 2020 relatif tidak mengalami perbedaan dibandingkan pada tahun sebelum pandemi, BPKP perlu memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan sekaligus mempercepat pencapaian target keluaran. Selain itu, BPKP juga perlu mengidentifikasi kendala-kendala yang menyebabkan sejumlah keluaran tidak tercapai sekaligus merumuskan mekanisme kegiatan baru yang lebih mudah, adaptif dan dapat dipertanggungjawabkan terutama dalam kondisi pandemi covid-19. Hal-hal tersebut kiranya penting untuk dapat digunakan sebagai masukan perbaikan dalam penyusunan target keluaran berikut anggarannya pada tahun-tahun

selanjutnya sehingga target keluaran yang akan disusun telah didukung anggaran yang paling efisien serta lebih mudah dalam proses pelaksanaan kegiatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, D., Fadli, & Lismawati. (2013). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi Global 2008. *Jurnal Fairness*, 3(1), 89-100.
- Ariwibawa, Y., Rachmina, D., & Falatehan, A. F. (2018). Strategi Peningkatan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1), 25-34. [https://doi.org/10.29244/jurnal\\_mpd.v10i1.22703](https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22703)
- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). *Tinjauan Ekonomi, Keuangan & Fiskal: Menjaga Optimisme Pemulihan Ekonomi*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2019). *Laporan Kinerja Tahun 2019: Memperkuat Kompetensi Pengawasan Intern yang Berkelanjutan Demi Bakti untuk Negeri*. Jakarta: BPKP RI.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2020). *Laporan Kinerja BPKP Tahun 2020: Transformasi Pengawasan untuk Hasil yang Lebih Berkualitas*. Jakarta: BPKP RI.
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan Perekonomian Indonesia 2020: Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2020: Melanjutkan Perbaikan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Fahrika, A. I. , & Roy, J. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respon Kebijakan yang Ditempuh. *Jurnal Inovasi*, 16 (2), 206-213. <https://10.29264/jinv.v16i2.8255>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Bidang Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryanto. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Pergerakan Nilai Tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 151-165. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.114>
- Herawati, L. (2016). *Uji Normalitas Data Kesehatan Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Poltekkes Jogja Press.
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 995-1013. Retrieved from <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/600>
- Kementerian Keuangan. (2020). *APBN Kita, Kinerja dan Fakta, April 2020: Menjaga dan Mengelola #Uangkita ditengah tekanan pandemi COVID-19*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan (2021). *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kurniati, S. & Ahmad, T. (2012). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008. Undergraduate Thesis*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

- Magdalena, M., & Kurniawan, Ch. H. (2013). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Modus Journals*, 25 (1), 91-106. <https://doi.org/10.24002/modus.v25i1.549>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4 (2), 240-252. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>
- Mungkasa, O. (2020). Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4 (2), 126-150. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119>
- Neely, A. (2004). *Business Performance Measurement: Theory and Practice*. Cambridge, UK: Cambridge University.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Permatasari, D. (2021). *Kebijakan Covid-19 dari PSBB hingga PPKM Empat Level*. Retrieved from <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>
- Puspitasari, R. (2021). *Siaran Pers: Pemerintah Prioritaskan Penanganan Pandemi, Perlindungan Sosial, dan Dukungan UMKM Selama Masa Pembatasan Kegiatan*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-prioritaskan-penanganan-pandemi-perlindungan-sosial-dan-dukungan-umkm-selama-masa-pembatasan-kegiatan/>
- Santoso, Y. W. (2018). Penyebab Krisis Finansial Global Tahun 2008: Kegagalan Financial Development dalam Mendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11 (1), 155-169. <http://dx.doi.org/10.20473/jhi.v11i1.5853>
- Suliantoro, I. (2020). Menimbang Kembali Formula Efisiensi pada Evaluasi Kinerja Anggaran. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4 (1), 49-69.
- Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SE-6/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 Hal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020.

- Triwiyanti, Ardina, T., & Maghfira, R. (2019). *Wilcoxon Test, Dependent Test and Independent Test*. Yogyakarta: Departmen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada.
- Tama, A. I. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Analisis Rasio Keuangan APBD Kabupaten/Kota di Indonesia Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 6 (2), 20-32.
- Tim Humas BPKP Pabar. (2020). *Cegah Corona, BPKP Pabar Gandeng RSAL Gelar Sosialisasi*. Retrieved from <http://www.bpkp.go.id/pabar/berita/read/23983/80/Cegah-Corona-BPKP-Pabar-Gandeng-RSAL-Gelar-Sosialisasi.bpkp>
- Tim Humas BPKP Maluku. (2020). *Rapat Implementasi WFH bagi Pegawai BPKP Maluku*. Retrieved from <http://www.bpkp.go.id/maluku/berita/read/24264/0/Rapat-Implementasi-WFH-bagi-Pegawai-BPKP-Maluku.bpkp>
- Yazici, B. & Yolacan, S. (2007). A Comparison of Various Tests of Normality. *Journal of Statistical Computation and Simulation*, 77(2), 175-183. <https://doi.org/10.1080/10629360600678310>